

DINAMIKA PROSES PEMEKARAN DAERAH CILACAP BARAT

Adi Arbi Susanto (14010113120016)

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Abstract

One of the interesting issues of the post-war collapse of the new orde in 1998 was the rise of area expansion that occur at the level of provincial and regency/city. The area expansion is regarded as customarily done with intent and purpose to become an instant solution to improve the welfare of the community in the area. It is currently conducted by the government of Cilacap with area expansion plan into two areas, namely Cilacap Regency and West of Cilacap Regency. But the fact up to now the expansion area of West Cilacap yet also realized.

Research methods used in this study is a qualitative approach to techniques of collecting data through observation, interview and documents studies. Informants in this study are Government of Cilacap Regency, DPRD of Cilacap Regency, Province Government of Central Java, DPRD of Central Java, activist of the expansion of West Cilacap, as well as LPPM Unsoed Purwokerto.

The results show that the discourse of expansion plan of West Cilacap by area, access to public services and development that have not been evenly distributed. The actors behind the proposed expansion West Cilacap of executive agencies, community organizations, and also the legislature. While the reason for the life span of the process of the expansion of Western support is because of Cilacap which is less solid, the problem of determining the location of the county seat, the attitude of the Governor of Central Java which has yet to give a respon to the proposed expansion, as well as the establishment of a moratorium on policy the new autonomous region (DOB) by the Central Government.

The recommendations which could be awarded against the dynamics that occur in the process of the expansion of West Cilacap are need for a public discussion forum was held to bring together related perceptions and views the proposed expansion of West Cilacap. Every actors involved in the process of expansion of West Cilacap in order to assume the role more maximum. As for Mr. Ganjar Pranowo as Governor of Central Java, we recommend that you immediately may determine the attitude or at least give an explanation what actually is the reason up to now still haven't taken action related proposed expansion of West Cilacap.

Keywords: West Cilacap, The Expansion Areas, The New Autonomous Region

1. PENDAHULUAN

Salah satu isu yang menarik pasca runtuhnya orde baru pada tahun 1998 silam adalah maraknya pemekaran daerah yang terjadi pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam perkembangannya, pemekaran daerah kemudian dianggap sebagai suatu hal yang lazim dilakukan dengan maksud dan tujuan menjadi solusi instan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal ini memang tidak salah, karena berdasarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah terbaru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dimana pembentukan daerah yang dimaksud disini adalah melalui pemekaran dan penggabungan daerah yang bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah;
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Dengan demikian, menjadi suatu hal yang wajar apabila pemekaran daerah dijadikan sebagai salah satu ikhtiar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Disamping itu, pemekaran daerah sejalan dengan fungsi substantif dari keberadaan pemerintahan, yakni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hadirnya sebuah pemerintahan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri atau bahkan dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Pandangan diatas mengindikasikan bahwa pemerintah perlu semakin dekat dengan masyarakatnya sehingga dapat memberikan respon secara cepat terhadap kebutuhan

masyarakat yang dinamis. Pemerintah yang dekat dan terjangkau oleh masyarakat akan memberikan pelayanan lebih cepat, efektif, dan juga ekonomis. Dalam hal ini maka pemekaran daerah menjadi sangat wajar terlebih dalam kondisi masyarakat yang semakin terbuka dan dinamis seperti sekarang.

Sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap pun telah mewacanakan adanya pemekaran daerah menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Ciacap Barat yang meliputi 10 kecamatan (Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Gandrungmangu, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, dan Cipari). Pemekaran daerah ini diwacanakan dengan tujuan sebagai sarana untuk pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk yang banyak menyebabkan rentang kendali pemerintahan menjadi kurang optimal. Beberapa infrastruktur bangunan dan kelengkapan pelayanan masyarakat juga mengalami ketimpangan antara wilayah Cilacap timur sebagai pusat pemerintahan dengan Cilacap barat yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Luasnya wilayah Kabupaten Cilacap kemudian juga memunculkan permasalahan jarak tempuh bagi warga yang tinggal di wilayah pinggiran untuk menuju ke pusat pemerintahan.

Wacana pemekaran daerah Cilacap Barat telah bergulir sejak tahun 2006 silam. Artinya, wacana pemekaran Cilacap Barat telah berkembang selama lebih dari 10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, berbagai langkah dan prosedur telah ditempuh oleh pihak-pihak terkait yang menginginkan terwujudnya pemekaran Cilacap Barat. Lamanya proses pemekaran daerah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, selama proses pemekaran bergulir, pastinya juga terjadi banyak dinamika dan perubahan pada masyarakat, baik dalam segi sosial maupun politik.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini dihasilkan dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi lapangan dan dengan data sekunder yang diperoleh dari Pemda Kabupaten Cilacap, DPRD Cilacap, LPPM Unsoed Purwokerto, dan dari beberapa sumber lain yang relevan baik dari jurnal maupun media online. Proses wawancara dilakukan dengan Pemda Kabupaten Cilacap, DPRD Cilacap, DPRD Jawa Tengah, LPPM Unsoed Purwokerto, Presidium Pemekaran Cilacap Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana pemekaran Cilacap Barat sudah muncul sejak tahun 1980-an tetapi usulan secara resmi kepada pemerintah provinsi baru ada pada tahun 2010 dan 2014. Wacana pemekaran daerah Cilacap Barat tersebut di latar belakangi oleh beberapa faktor, seperti luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Cilacap yang begitu banyak; terhambatnya akses pelayanan publik karena letak pusat pemerintahan yang jauh dari beberapa kecamatan yang berada di wilayah Cilacap Barat; kecemburuan sosial di masyarakat Cilacap Barat karena belum meratanya pembangunan di semua wilayah; faktor sejarah dan perbedaan budaya antara Cilacap Barat dan Cilacap Tengah (Kota); serta rentang kendali organisasi yang kurang optimal karena jarak dan luas wilayah.

Usulan pemekaran daerah Cilacap Barat secara resmi kemudian muncul pertama kali pada tahun 2005-2006 yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pemekaran (AMMP) dan Paguyuban Warga Cilacap Barat (PWCB). Namun setelah proses usulan sampai pada tingkat Provinsi, usulan ini ditolak oleh Gubernur Jawa Tengah waktu itu, Babit Waluyo dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Cilacap tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan dua pemerintahan sekaligus, yaitu daerah induk dan daerah pemekaran. Usulan pemekaran daerah Cilacap Barat periode kedua muncul setelah Babit Waluyo sebagai calon gubernur petahana kalah oleh Ganjar Pranowo pada Pilkada Jateng tahun 2013. Sesuai janjinya pada saat awal pencalonan Gubernur, Ganjar yang pernah menjabat sebagai Ketua

Panitia Kerja (Panja) Pemekaran DPR RI memang memberikan isyarat bahwa akan mendukung pemekaran Cilacap Barat asalkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pernyataan ini kemudian membangkitkan lagi semangat warga dan para tokoh/elite lokal Cilacap Barat untuk kembali merembut usulan pemekaran Cilacap Barat. Usulan pemekaran Cilacap Barat kali ini diinisiasi oleh Presidium Pemekaran Cilacap Barat, yang merupakan “panitia” pemekaran hasil dari peleburan beberapa kelompok dan organisasi masyarakat yang pro terhadap pemekaran daerah Cilacap Barat.

Sebagai salah satu dokumen persyaratan, Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah dua kali melakukan kajian pemekaran. Kajian pertama dilakukan pada tahun 2007 bekerjasama dengan Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Kajian kedua dilakukan pada tahun 2014 bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsoed Purwokerto. Kedua kajian tersebut menyatakan pemekaran Kabupaten Cilacap layak dan merekomendasikan Kecamatan Sidareja ((2007) dan Kecamatan Majenang (2014) sebagai lokasi calon Kota Kabupaten.

Dalam proses pemekaran Cilacap Barat, terdapat banyak aktor yang terlibat, mulai dari organisasi masyarakat seperti Paguyuban Warga Cilacap Barat (PWCB); Aliansi Masyarakat Peduli Pemekaran Kabupaten Cilacap (AMMPKC); Presidium Pemekaran Kabupaten Cilacap Barat (PPKCB); Majelis Rakyat Cilacap Barat (Marciba); dan Presidium Pemekaran Cilacap Barat. Pemerintah Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji (2007-Sekarang), pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Babit Waluyo (2008-2013) dan Gubernur Ganjar Pranowo (2013-Sekarang), serta DPRD Kabupaten Cilacap, DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPR RI dan juga DPD RI. Tiap-tiap aktor memiliki peran berbeda dalam proses pemekaran Cilacap Barat. Bahkan adapula yang memiliki maksud dan tujuan lain, seperti mantan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap periode 1999-2014 yang secara jelas memiliki agenda lain, yakni untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan mendirikan organisasi Paguyuban Warga Cilacap Barat (PWCB) untuk mendorong usulan lokasi

calon Kota Kabupaten berada di Kecamatan sidareja karena yang bersangkutan terbukti memiliki beberapa aset ekonomi di wilayah tersebut. Kemudian, ketua Presidium Pemekaran Cilacap Barat, Bambang Suharto yang memanfaatkan isu pemekaran daerah untuk memperoleh dukungan dan kekuasaan karena yang bersangkutan secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon Bupati Cilacap pada Pilkada 2017.

Fakta hingga saat ini, pemekaran daerah Cilacap Barat belum juga terlaksana yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang menghambat dan menyebabkan lamanya proses pemekaran Cilacap Barat seperti, kurang solidnya dukungan dari semua pihak yang terlibat; adanya motivasi dan tujuan lain dari para aktor dibalik usulan pemekaran Cilacap Barat; permasalahan penentuan lokasi calon Kota Kabupaten; kurangnya *pressure* dari para pengusul dan aktivis pemekaran kepada pemerintah provinsi; serta adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.

Lamanya proses pemekaran daerah Cilacap kemudian memunculkan dinamika yang beragam di masyarakat yang secara umum menggambarkan bahwa dukungan masyarakat terhadap wacana pemekaran daerah Cilacap Barat mengalami pasang surut. Pada awal kemunculan wacana pemekaran, dukungan dari berbagai pihak begitu kuat (2007-2010). Namun semenjak usulan pertama ditolak oleh Gubernur Bibit Waluyo ditambah lagi dengan pembangunan yang mulai dirasakan oleh masyarakat Cilacap Barat, dukungan pun mulai meredup. Usulan pemekaran saat ini sudah sampai pada tahap pemerintah provinsi. Tinggal menunggu bagaimana sikap Gubernur dan DPRD Provinsi, sembari menunggu kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.

4. KESIMPULAN

Wacana pemekaran Cilacap Barat sudah muncul sejak tahun 1980-an tetapi usulan secara resmi kepada pemerintah provinsi baru ada pada tahun 2010 dan 2014. Artinya perjuangan pemekaran Cilacap Barat sudah lebih dari puluhan tahun. Usulan pemekaran tersebut di latar belakangi oleh beberapa faktor, seperti luas wilayah dan

jumlah penduduk Kabupaten Cilacap; terhambatnya akses pelayanan publik karena letak pusat pemerintahan yang jauh dari Cilacap Barat; kecemburuhan sosial di masyarakat Cilacap Barat karena belum meratanya pembangunan di semua wilayah; faktor sejarah dan perbedaan budaya antara Cilacap Barat dan Cilacap Tengah (Kota); serta rentang kendali organisasi yang kurang optimal karena jarak dan luas wilayah. Dalam usulan tersebut banyak aktor yang terlibat mulai dari Organisasi Masyarakat, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif. Lamanya proses pemekaran daerah Cilacap Barat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, kurang solidnya dukungan dari semua pihak yang terlibat; adanya motivasi dan tujuan lain dari para aktor dibalik usulan pemekaran Cilacap Barat; permasalahan penentuan lokasi calon Kota Kabupaten; kurangnya *pressure* dari para pengusul dan aktivis pemekaran kepada pemerintah provinsi; serta adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat. Lamanya proses pemekaran daerah Cilacap kemudian memunculkan dinamika yang beragam di masyarakat yang secara umum menggambarkan bahwa dukungan masyarakat terhadap wacana pemekaran daerah Cilacap Barat mengalami pasang surut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Dalam Negeri. (2010). *Desain Besar Penataan Daerah Di Indonesia Tahun 2010-2025*, Jakarta; Kementerian Dalam Negeri.
- LIPI. (2006). *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Makagansa. (2008). *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: FusPad.
- Nurcholis, Hanif (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta; Grasindo.

Ratnawati, Tri. (2009). *Pemekaran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Retnaningsih, Ning (Eds). (2008). *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah (Territorial Reform) Dan Dinamikanya*. Salatiga: Percik.

Salam, Dharma Setyawan. (2004). *Otonomi Daerah dalam perspektif lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.

Santoso, Agus. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syaukani, HR. (2012). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.

Widjaja, HAW. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

_____. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Arief Nurdiansah. *Daerah (Persiapan) Otonomi*. Koran Jurnal Nasional 18 Maret 2013.

Endarto. *Evaluasi Pemekaran Daerah di Era Reformasi*. Jurnal Lingkar Widyaeswara Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014.

Nunik Retno Herawati. *Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jurnal Politika Vol. 12 No. 1 Tahun 2011.

Tri Ratnawati. *Evaluasi Pemekaran Daerah dan Saran Perbaikan ke Depan*. Koran Jurnal Nasional 12 Februari 2010.

_____. *Satu Dasawarsa Pemekaran*. Jurnal Ilmu Politik Edisi.21 Tahun 2010.

Yuwanto. *Persepsi Elit Lokal terhadap Wacana Pemekaran Daerah di Kabupaten Cilacap*. Jurnal Politika Vol. 6 No.2 Oktober 2015

Internet:

<http://berita.suaramerdeka.com/kajian-lppm-unsoed-dukung-pemekaran-cilacap-barat/>
(diunduh pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 14.09 WIB)

<http://fokuscilacap.com/bambang-diyakini-bakal-gerus-suara-tatto-di-pilkada-cilacap-2017>
(Diunduh pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 20.00)